

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM HUBUNGAN BERPACARAN**

(Studi di LBH APIK Jakarta)

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Raista Nur Tazkiya

NIM. 115010101111038



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM HUBUNGAN BERPACARAN
(Studi di LBH APIK Jakarta)**

Raista Nur Tazkiya, Dr.Prija Djatmika,SH,MS, Milda Istiqomah,SH,MTCP

Fakultas Hukum Universita Brawijaya

E-mail : raista.tzky@gmail.com

ABSTRAKSI

Artikel Ilmiah ini membahas tentang Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran studi di LBH APIK Jakarta. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam hal memberikan Perlindungan Hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh LBH :

1. Konsultasi Hukum dan Penanganan kasus
2. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintahan dan Program Laki-Laki Baru
3. Kerjasama dengan Lembaga Internasional
4. Kampanye Anti Kekerasan dan Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi LBH dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran mayoritas berkaitan dengan Aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Perempuan, Korban, Kekerasan, berpacaran

ABSTRACT

This scientific article discuss about protection of law that gave by legal aid organization for women who became victim of dating violence, research in LBH APIK Jakarta. This is an empiric juridical research. This research using juridical sosiologic method. The purpose of this research are to describe and analysis protections of Law that gave by legal aid organization for women who became victims of dating violence, and to describe and analysis the constraints that legal aid organization haved for giving the maximum protection of law for women who became victim of dating violence. The result of this research are there are four kind of protection that legal aid organization can gived :

1. Law counseling and case handling
2. Collaboration with government organization and new men program
3. Collaboration with international organization
4. Against violence campaign and collaboration with non government organization.

The constraints that legal aide organization haved for givin a maximum protection of law for women who became victim of dating violence be related with founder of law intuitions.

Key words : protection of law, legal aid organization, women, victims, violence, dating

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3, dari isi pasal tersebut dapat diartikan Indonesia menjunjung tinggi hukum dan segala proses pemerintahan dilaksanakan berdasar atas hukum. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹. Hukum memiliki beberapa tujuan, dimana dalam tujuan etis hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, lalu menurut teori utilities hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dan menurut teori campuran tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban².

Berpacaran Menurut Reksoprojo adalah perasaan yang tumbuh di kalangan anak laki laki dan perempuan menuju kedewasaan, pacaran merupakan masa pencarian pasangan, penjajakan, dan pemahaman akan berbagai sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan³. Pacaran adalah aktivitas yang sudah dianggap biasa diberbagai kalangan, menurut Maria Anshor selaku ketua komisi perlindungan anak pada tahun 2012 terdapat 63% pasangan yang berpacaran merupakan remaja (dibawah 18 tahun) bahkan 43% di antara nya adalah di bawah 15 tahun⁴. Berdasarkan data di atas menyatakan bahwa aktivitas berpacaran sudah menyebar ke berbagai kalangan, sekian banyaknya aktivitas berpacaran kekerasan kerap kali terjadi, mayoritas korban dari kekerasan dalam hubungan berpacaran adalah perempuan.

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hal 40.

² *Ibid*, Hal 77-81.

³ Rony Setiawan, **Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku seks Pranikah**, Journal Soul, Volume 1, Universitas Islam Malang, Malang, 2008, Hal 62

⁴. Ika Ningtyas, **KPAI: Pacaran Pertama Anak Indonesia Umur 12 Tahun**, 2011, (online) <http://www.tempo.co/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2013 pukul 17.00 wib).

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta mencapai angka 11.289 pada tahun 2013⁵. Menurut Meutia Hatta saat konferensi pers Rencana Aksi Nasional Mewujudkan Keluarga Bersih dari Pornografi, 1 dari 5 remaja putri mengalami kekerasan dalam berpacaran atau *dating violence*⁶. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta. Kasus yang paling banyak terjadi peningkatan adalah kasus kekerasan fisik, yakni mencapai 71% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 30%. Disusul peringkat kedua, kasus kekerasan seksual yang mencapai 14%, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai 8%, kemudian kekerasan psikis yang mencapai 10%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 17,5%⁷, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam hubungan berpacaran dari waktu ke waktu semakin meningkat, dengan jumlah terbanyak pada tahun 2012, sehingga diperlukan perlindungan dan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan berpacaran.

Kekerasan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa peran lembaga kepolisian masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah kekerasan tersebut. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang belum terselesaikan menjadi bukti bahwa peran lembaga kepolisian masih belum maksimal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011⁸ Tentang Bantuan Hukum selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa

⁵ Maria Natalia, 2011, **Kekerasan pada Perempuan Semakin Parah**, 2012, (online) <http://nasional.kompas.com/> (diakses pada 25 Februari 2014 pukul 13.15 wib)

⁶ Nadhifa Putri, **1 Dari 5 ABG Putri Alami Kekerasan Seksual Saat Pacaran**, 2012, (online) <http://news.detik.com/> (diakses pada 25 Februari 2014 pukul 13.15 wib)

⁷ Leni Tristia Tambun, **Kasus Kekerasan Fisik pada Perempuan dan Anak Meningkat**, 2013, (online) <http://www.beritasatu.com/> (diakses pada tanggal 02 Maret 2014 pukul 12.46 wib)

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau yang disebut UU Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 104 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248

pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka .2 mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Ruang lingkup dari bantuan hukum di atur dalam Pasal 4 ayat 1 adalah Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 5 menjelaskan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengaduan karena memiliki masalah hukum termasuk diantaranya perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran. Maka disusunlah skripsi ini oleh peneliti, yaitu mengenai” Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran”

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam hal memberikan Perlindungan Hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran ?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam hal memberikan Perlindungan Hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *Yuridis Empiris* dengan metode pendekatan *Yuridis sosiologis* untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran beserta kendala-kendalanya. Untuk memperoleh hasil yang relevan maka sumber data dilakukan dengan penelitian lapang di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta dan data diperoleh dengan cara *interview* semi terpimpin dengan pedoman *interview* dengan responden, kemudian data dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif*.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran

a. Penanganan Kasus dan Konsultasi Hukum

Lembaga Bantuan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta atau yang disebut LBH APIK Jakarta sudah banyak menangani permasalahan hukum, permasalahan hukum yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta mayoritas merupakan isu hukum seputar diskriminasi gender khususnya perempuan. Menurut data Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta dari tahun 2009-2013 terdapat 4.327 pengaduan dan penanganan kasus di LBH APIK Jakarta. Pada tahun 2009 LBH APIK Jakarta menangani 1058 kasus, tahun 2010 LBH APIK Jakarta menangani 914 kasus, tahun 2011 menangani 709 kasus, tahun 2012 menangani 654 kasus, dan yang terakhir pada tahun 2013 terdapat 992 kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa kasus terbanyak yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta berada di tahun 2012 sebanyak 1058 kasus⁹.

Tahun 2013, dari 992 pengaduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta, sebanyak 326 korban datang langsung ke kantor LBH APIK Jakarta, 129 orang korban melalui telepon, 35 korban melalui email, dan 18 orang korban melalui proses jemput bola (staff LBH APIK Jakarta mendatangi korban), dan Terdapat 484 kasus ditangani oleh paralegal LBH APIK Jakarta¹⁰.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pidana, LBH APIK Jakarta membaginya dalam beberapa jenis, antara lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan kekerasan seksual. Menurut data yang ada,

⁹ Data Primer, diolah, 2014

¹⁰ Data Primer, diolah, 2014

KDRT masih menempati posisi tertinggi, yakni dengan 362 kasus (71.826%). TPPO terdapat 11 kasus (2,18%), kekerasan dalam pacaran 59 kasus (11,51%), kekerasan seksual berjumlah 23 kasus (4,56%), kejahatan perkawinan 17 kasus (3,37%) dan pidana umum berjumlah 19 kasus (3,77%). Klasifikasi yang masuk dalam kategori pidana umum adalah pencemaran nama baik, penganiayaan, penipuan, pemerasan, intimidasi, pencurian, penggelapan, dan penculikan. Tahun 2013 mitra yang mengalami kekerasan dalam hubungan berpacaran sebanyak 59 orang. Kekerasan seksual merupakan kasus paling banyak terjadi dalam kasus kekerasan dalam hubungan berpacaran¹¹.

b. Program Laki-laki baru dan Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah

LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengadakan program baru yang dinamakan Program Laki-Laki Baru. Program ini adalah salah satu program penyuluhan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta beserta dengan beberapa lembaga terkait terhadap para lelaki. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para laki-laki, yang mayoritas adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya kekerasan dalam hubungan berpacaran untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya kekerasan dalam hubungan berpacaran¹²

c. Kampanye Anti Kekerasan dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

LBH APIK Jakarta menyuarkan aksi kampanye Anti Kekerasan terhadap perempuan yang didalamnya termasuk perempuan korban kekerasan

¹¹ Data primer, diolah, 2014

¹² Hasil Wawancara Khusnul Anwar,SHI, Staff Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, 03 Oktober 2014

dalam hubungan berpacaran dan juga memberikan surat dukungan. Kampanye ini tidak dilakukan LBH APIK Jakarta sendiri, namun juga bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM Pulih, LSM Rifka Annisa, dan LSM Rumah Perlindungan Trauma Centre). Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya sebatas itu, namun juga dalam hal memberikan penyuluhan-penyuluhan anti kekerasan kepada masyarakat¹³.

d. Bekerja sama dengan Lembaga Internasional

LBH APIK Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan yang termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran bekerja sama dengan lembaga internasional seperti ,State of Connecticut Judicial Branch, TIFA, Oxfam Novib Belanda, dan Kedutaan Belanda.

2. Kendala-kendala bagi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran.

Menurut Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta tahun 2013, kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, yang termasuk didalamnya kekerasan dalam hubungan berpacaran didominasi oleh pihak aparat penegak hukum, diantaranya :

1. Aparat Penegak Hukum tidak melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, padahal pasal yang dikenakan memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan terhadap pelaku. Pelaku yang tidak ditahan dapat menghilangkan barang bukti, mempengaruhi korban/ keluarga korban bahkan melarikan diri. Kondisi demikian makin

¹³ Hasil Wawancara Khusnul Anwar,SHI, Staff Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, 03 Oktober 2014

memperburuk kondisi psikologi korban, korban menjadi frustrasi dan tidak percaya lagi pada proses hukum yang ada.

2. Aparat Penegak Hukum justru mempersalahkan korban. Korban dianggap sebagai pihak yang menjadi pihak yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Stigma negative terhadap perempuan , maka kekerasan yang dialami seakan sudah menjadi resiko atau konsekuensi dari kenakalannya.
3. Kekerasan seksual yang terjadi secara berulang-ulang, Aparat Penegak Hukum sudah apriori bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah sebuah tindak pidana, karena dilakukan atas dasar perasaan suka sama suka. Aparat Penegak hukum seolah menafikan kenyataan bahwa dalam relasi berpacaran kekerasan seksual dapat terjadi.
4. Aparat penegak hukum masih menggunakan norma umum dalam KUHP, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur. Diskriminasi terhadap terdakwa perempuan (terlebih jika miskin) dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara berlapis. Penerapan undang-undang tidak hanya menggunakan norma khusus, namun juga norma umum. Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki pengaruh, maka pasal dengan ancaman hukuman ringan yang diterapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa Aparat Penegak Hukum tidak konsisten dan diskriminatif dalam penerapan hukum terhadap tersangka/ terdakwa, serta mengesampingkan asas persamaan dimuka umum (*equality before the law*), dan prinsip negara hukum.
5. Tidak adanya koordinasi dan tidak meratanya pengetahuan dan pemahaman teori hukum pada aparat penegak hukum. Pasal dalam undang-undang dibaca secara harfiah, tidak ada penafsiran luas yang berbasiskan pada teori-teori hukum yang ada. Kasus kekerasan seksual Pasal undang-undangnya tidak bisa dibaca secara harfiah, Pasal undang-

undang harus dibaca tidak hanya secara tekstual, namun juga kontekstual. Penafsiran pasal juga dimungkinkan dalam ilmu hukum, sejauh berbasis pada teori-teori yang ada.

6. Proses pembuktian, aparat penegak hukum lebih menekankan pada alat bukti keterangan saksi. Terdapat empat alat bukti lainnya, dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual/pemeriksaan, jika hanya mengandalkan pada alat bukti keterangan saksi, maka sangat sulit mengungkap kasus kekerasan seksual. Kondisi khusus dalam kasus kekerasan seksual adalah minimnya keterangan saksi.
7. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, aparat penegak hukum justru menawarkan proses penyelesaian kasus diluar pengadilan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi, lebih-lebih jika melihat riwayat kekerasan yang dialami korban.
8. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian terbaik atas kekerasan seksual (yang mengakibatkan kehamilan atau tidak) adalah menikahkan pelaku dengan korban. Banyaknya kasus perkawinan korban dengan pelaku adalah pintu gerbang menuju kekerasan-kekerasan berikutnya.
9. Proses hukum yang sangat panjang. Kondisi ini membuat korban kelelahan yang pada akhirnya memilih mencabut atau membiarkan kasus yang telah korban laporkan.
10. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan aparaturnya, kesulitan atau hambatan yang paling umum dihadapi antara lain :
 1. Proses penanganan tidak transparan
 2. Mekanisme pelaporan yang tidak jelas

3. Mekanisme penanganan kasus yang tidak jelas
 4. Solidaritas korp
 5. Resistensi dan upaya melindungi pelaku
 6. Proses penanganan dan penyelesaian kasus sangat lama.
11. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan berpacaran masih berharap pelaku bisa berubah menjadi lebih baik dan bahkan korban masih percaya bahwa dengan menikah dengan pelaku, bisa membuat pelaku menjadi lebih baik.
 12. Faktor latar belakang dan relasi pelaku mempengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum.
 13. Pengenaan pasal pada pelaku kekerasan dalam hubungan berpacaran.

2.1 Upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta

Banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran mengharuskan LBH APIK Jakarta melakukan beberapa upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta, upaya-upaya tersebut adalah¹⁴ :

- a. Memberikan Pemahaman yang Spesifik kepada Aparat Penegak Hukum tentang Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran.**

¹⁴ Hasil Wawancara Khusnul Anwar, S.Hi, Staff Pelayanan hukum LBH APIK Jakarta, 2 Desember 2014

Mayoritas kendala-kendala yang dialami oleh LBH APIK Jakarta berkaitan dengan Aparatur Negara, Khususnya Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aparat penegak hukum kerap kali melakukan diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam hubungan berpacaran. Upaya pertama yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta yang pertama adalah dengan memberikan pemahaman yang spesifik kepada aparat penegak hukum tentang perbedaan antara kekerasan pokok dengan kekerasan dalam hubungan berpacaran.

Aparat penegak hukum kerap kali menyamakan tindak kekerasan dalam hubungan berpacaran dengan kekerasan pokok, padahal menurut wawancara dengan Khusnul Anwar selaku staf Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta kekerasan dalam hubungan berpacaran berbeda dengan kekerasan pokok. Unsur utama yang membedakannya adalah adanya perasaan dan hubungan khusus antar pelaku dengan korban. Perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran akan terikat dengan pelaku karena adanya perasaan khusus tersebut. LBH APIK Jakarta memberikan pemahaman ini terhadap aparat penegak hukum.

b. Usulan RUU Kekerasan dalam hubungan berpacaran.

LBH APIK Jakarta sudah banyak memberikan usulan RUU kepada DPR RI yang mayoritas membahas tentang masalah perempuan, seperti salah satunya RUU Perkosaan. Khusnul Anwar menjelaskan

bahwa pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum tentang kekerasan dalam hubungan berpacaran menimbulkan kesalah pahaman dalam memvonis pelaku, sehingga penting bagi lembaga legislatif untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang kekerasan dalam hubungan berpacaran. LBH APIK Jakarta memberikan usulan RUU kekerasan dalam hubungan berpacaran kepada DPR RI, namun usulan ini belum ditanggapi oleh DPR RI.

c. Dukungan Dari Publik atau Masyarakat.

LBH APIK Jakarta dalam melakukan penanganan kasus kerap kali meminta bantuan kepada publik atau masyarakat, dengan cara melakukan konferensi pers. Dukungan dari masyarakat dianggap sangat membantu dalam kasus-kasus kekerasan dalam hubungan berpacaran, dukungan bisa berupa kampanye anti kekerasan, penyuluhan-penyuluhan, atau hadir dalam persidangan sudah cukup menunjukkan dukungan kepada korban.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan:

1. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran adalah :
 - a. Konsultasi hukum, LBH APIK Jakarta membuka layanan konsultasi hukum bagi perempuan-perempuan yang membutuhkan konsultasi hukum, termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran. Pada tahun 2013 LBH APIK Jakarta menerima 380 konsultasi hukum yang masuk ke LBH APIK Jakarta.
 - b. Penanganan kasus, LBH APIK Jakarta menangani berbagai macam kasus hukum, baik kasus hukum pidana (504 kasus), perdata (302 kasus), ketenagakerjaan (8 Kasus), dan penggusuran (178 Kasus). Ruang lingkup kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta baik litigasi maupun non litigasi. Terdapat 59 kasus kekerasan dalam hubungan berpacaran yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta.
 - c. Program Laki-laki baru dan Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah, LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengadakan program baru yang dinamakan Program Laki-Laki Baru. Program ini adalah salah satu program penyuluhan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta beserta dengan beberapa lembaga terkait terhadap para lelaki. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih

dalam kepada para laki-laki, yang mayoritas adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya kekerasan dalam hubungan berpacaran untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya kekerasan dalam hubungan berpacaran.

- d. Kampanye Anti Kekerasan dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, LBH APIK Jakarta menyuarkan aksi kampanye Anti Kekerasan terhadap perempuan yang didalam nya termasuk perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran dan juga memberikan surat dukungan. Kampanye ini tidak dilakukan LBH APIK Jakarta sendiri, namun juga bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM Pulih, LSM Rifka Annisa, dan LSM Rumah Perlindungan Trauma Centre). Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya sebatas itu, namun juga dalam hal memberikan penyuluhan-penyuluhan anti kekerasan kepada masyarakat.
- e. Bekerja sama dengan Lembaga Internasional, LBH APIK Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan yang termasuk didalam nya perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Court Aid, TIFA, Oxfam Novib Belanda, dan Kedutaan Belanda.

2.Kendala-Kendala untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam hal memberikan Perlindungan Hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran adalah :

- a. Aparat Penegak hukum tidak Melakukan Penahanan terhadap Pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan,padahal pasal yang dikenakan memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan terhadap pelaku.
- b. Banyaknya realitas dimana aparat penegak hukum justru mempersalahkan korban.
- c. Kekerasan seksual yang terjadi secara berulang-ulang, aparat penegak hukum sudah apriori bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah sebuah tindak pidana..
- d. Tidak adanya koordinasi dan tidak meratanya pengetahuan dan pemahaman teori hukum pada aparat penegak hukum.
- e. Proses pembuktian, aparat penegak hukum lebih menekankan pada alat bukti keterangan saksi.
- f. Proses penanganan kasus kekerasan terhdap perempuan,aparat penegak hukum justru menawarkan proses penyelesaian kasus di luar pengadilan.
- g. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian terbaik atas kekerasan seksual (yang mengakibatkan kehamilan) adalah menikahkan pelaku dengan korban.
- h. Proses hukum yang sangat panjang.

- i. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan aparaturnegara, kesulitan atau hambatan yang paling umum dihadapi anatara lain :
 - a) Proses penangan tidak transparan
 - b) Mekanisme pelaporan yang tidak jelas
 - c) Mekanisme (tahapan) penanganan kasus yang tidak jelas
 - d) Solidaritas korp satuan
 - e) Adanya resistensi dan upaya melindungi pelaku
 - f) Proses penanganan dan penyelesaian kasus dangat lama.
- k. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan berpacaran masih berharap pelaku bisa berubah menjadi lebih baik dan bahkan korban masih percaya bahwa dengan menikah dengan pelaku, bisa membuat pelaku menjadi lebih baik.
- l. Faktor latar belakang dan relasi pelaku mempengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum.
- m. Pengenaan pasal pada pelaku kekerasan dalam hubungan berpacaran.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Saran untuk lembaga bantuan hukum agar terus menjalankan bantuan-bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi subjek-subjek Hukum yang

membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, khususnya perempuan-perempuan korban kekerasan.

2. Bagi Korban

Saran untuk perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran agar tetap mempertahankan hak-haknya sebagai subjek hukum, walaupun banyak aparat penegak hukum yang mencoba untuk mendiskriminasikan hak-hak hukum perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran

3. Bagi Pemerintah

Saran untuk Pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek-subjek hukum yang membutuhkan pertolongan secara adil dan tanpa diskriminasi.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011

Ika Ningtyas, KPAI: Pacaran Pertama Anak Indonesia Umur 12 Tahun, 2011, (online) <http://www.tempo.co/>.

Maria Natalia, 2011, Kekerasan pada Perempuan Semakin Parah, 2012, (online) <http://nasional.kompas.com>

Nadhifa Putri, 1 Dari 5 ABG Putri Alami Kekerasan Seksual Saat Pacaran, 2012, (online) <http://news.detik.com>

Leni Tristia Tambun, Kasus Kekerasan Fisik pada Perempuan dan Anak Meningkat, 2013, (online) <http://www.beritasatu.com>.